BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan KKL

Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks. Pemerintah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur kehidupan warga negaranya. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur kepemilikan dan penggunaan kekuasaan yang telah diberikan kepada negara (atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya) sehingga semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan bangsa Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki yaitu pelayanan *(service)*, pemberdayaan *(empowerment)*, dan pembangunan *(development)*. Jadi selain melaksanakan pembangunan, pemerintah juga memberikan pelayanan publik.

Institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat perlu menemukan dan memahami cara yang profesional dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, kebutuhan masyarakat menjadi tuntutan dan tanggung jawab pemerintah. Karena itu, pemerintahan perlu diselenggarakan secara dinamis, tanggap, cepat dan tepat sasaran.

Era globalisasi menuntut adanya kompetisi dari beberapa negara untuk saling bersaing guna merebutkan kedudukan sebagai negara penentu dalam dunia baik dalam bidang perekonomian, sosial budaya, politik dan sebagainya. Perkembangan sumber daya manusia juga dituntut agar lebih baik karena kemajuan teknologi, perdagangan dan sebagainya ditentukan oleh sumber daya manusia selaku pelaku dan penggerak semua itu.

Sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting di dalam pembangunan, disamping unsur lainnya seperti bahan, modal, dan teknologi. Pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik, apabila ditunjang oleh sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia

merupakan unsur yang sangat penting untuk tercapainya keberhasilan pembangunan.

Manajemen sumber daya aparatur secara profesional dapat dimulai sejak perekrutan pegawai, penyelesaian, pengklasifikasian, penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan, penataran, dan pengembangan kariernya. Instansi atau lembaga, mempunyai banyak pegawai yang secara potensi berkemampuan tinggi tetapi tidak mampu berprestasi dalam kerja. Hal ini dimungkinkan karena manajemen sumber daya aparatur yang kurang dikelola secara profesional. Karena itu, faktor manusia merupakan modal utama yang perlu diperhatikan oleh pemimpin atau kepala dalam suatu instansi atau lembaga.

Peran yang begitu besar sumber daya manusia sebagai pelaku utama dan juga merupakan *input* dari proses produksi dalam pembangunan akan tercapai apabila faktor-faktor penunjang optimalisasi peran tersebut tercapai. Salah satu faktor yang menentukan peran SDM adalah kinerja. Jika aparatur dalam organisasi atau perusahaan mempunyai kinerja yang baik, maka diharapkan akan mempunyai kontribusi positif terhadap organisasi atau perusahaan.

Keberhasilan suatu organisasi pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya, sebab hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi upaya pencapaian tujuan organisasi. Kinerja suatu organisasi dapat dinilai salah satunya dari efektifitas aparatur didalam memahami dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar waktu yang telah direncanakan.

Kota Bandung sebagai ibu kota Propinsi Jawa Barat merupakan kota satelit yang mempunyai kedudukan sangat penting dan strategis, terutama sebagai salah satu kota tujuan wisata. Karena itu pembangunan sarana dan prasarananya sangat ditentukan oleh keberadaan lingkungan yang mempengaruhinya seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertambahan penduduk yang semakin pesat dan perkembangan kota-kota yang kian meningkat. Sehingga perkembangan dan pertumbuhan tersebut

memerlukan pengaturan tata ruang dan peruntukan lahan yang sesuai dengan kegiatan penataan kota yang sehat, rapi, aman, dan nyaman tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan ketidaktertiban dan kesemrawutan kota.

Instansi Pemerintahan yang mengatur tentang rencana tata ruang di Kota Bandung adalah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung. Manajemen sumber daya aparatur di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung yang dimana diantaranya susunan organisasi pemerintah yang masih belum sepenuhnya mengacu kepada kebutuhan. Pembagian tugas antar instansi atau unit yang kurang jelas, menyebabkan munculnya aparatur yang kurang profesional, dan prosedur standar yang belum tersedia secara baku serta sistem pengawasan/pengendalian yang masih belum efektif.

Hal ini merupakan bukti, bahwa suatu organisasi maupun para aparatur belum dapat mengatur para aparatur di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung secara maksimal serta mengarahkan para aparatur menjadi aparatur yang profesional di bidangnya. Masalah manajemen sumber daya aparatur di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung ini akan mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat terhambat, tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam SOP.

Bagi suatu instansi pemerintah, dalam menjalankan aktivitasnya selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan masalah aparat, salah satunya adalah masalah prestasi kerja aparat yang cenderung tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga pemerintah. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung sebagai salah satu Instansi pemerintah, akan selalu dihadapkan dengan masalah kinerja atau prestasi kerja tersebut.

Aparatur adalah orang-orang yang menjalankan roda pemerintahan. Aparatur memiliki peranan strategis dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Peranan aparatur tersebut sesuai dengan tuntutan zaman terutama untuk menjawab tantangan masa depan.

Aparatur yang berkualitas adalah aparatur yang memiliki kecakapan dan kemampuan, yang sangat dibutuhkan dalam rangka menghadapi tantangan tersebut. Kemampuan untuk melaksanakan setiap tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Hal lainnya adalah mampu memelihara dan mengembangkan kecakapan dan kemampuannya secara berkesinambungan. Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas pimpinan pada setiap organisasi pemerintahan untuk memelihara dan membina semua aparatur agar dapat lebih berkualitas dalam rangka pencapaian tujuan.

Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Penataan ruang dilakukan berdasarkan, 1). Fungsi utamanya, meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. 2). Aspek administrative, meliputi ruang Wilayah Nasional, Wilayah Propinsi dan Wilayah Kabupaten.

Rencana Tata Ruang sebagai acuan dalam pembangunan wilayah adalah pembangunan yang dilandasi oleh pengwilayahan fakta. Wilayah fakta inilah yang mencerminkan persamaan-persamaan ataupun perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat, yang selanjutnya akan mencerminkan kebutuhan-kebutuhan anggota masyarakat.

Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan suatu alat bantu yang disusun dengan perspektif menuju ke keadaan masa depan yang diharapkan. Perencanaan RTRW bertitik tolak dari data dan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan metode penyusunan. Lingkup data yang digunakan mencakup data dan informasi fisik alami, social budaya dan hubungan ketergantungan wilayah perencanaan dengan wilayah lainnya. Kegiatan berencana pada umumnya dan pembangunan berencana pada khususnya adalah suatu kegiatan berangkai, atau suatu proses yang meliputi aspek Kebijakan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Penilaian (Plan, Planing,Implementation,Monitor). Kebijakan pembangunan dapat dirumuskan dengan baik jika ditopang oleh fakta-fakta yang baik dan sejalan dengan sasaran atau tujuan yang akan dicapai. Pengwilayahan adalah usaha untuk menyajikan fakta keruangan (spatial) se-efektif mungkin

dengan tujuan supaya penetapan kebijaksanaan pembangunan bisa lebih cermat.

Kegiatan perencanaan terdiri dari usaha untuk menetapkan prioritas proyek, sebagai kelanjutan usaha penjabaran kebijaksanaan pembangunan ke dalam pelbagai proyek, kemudian menetapkan proyek-proyek penunjangnya, dananya, jangka waktu pelaksanaannnya, memikirkan kemungkinan dampaknya, kebutuhan personalianya dan akhirnya kebutuhan tanahnya (ruang).

Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi tata ruang kota Bandungsemakin hari semakin tidak jelas dan menjurus kepada hilangnya ruang-ruang publik. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota telah mengabaikan hak-hak publik dan lingkungan, sehingga dapat mengakibatkan lingkungan yang ada saat ini tidak memiliki dukungan sosial, dan ekologi. Tentu saja dampak yang dirasakan adalah kesemrawutan yang akan berakibat pada timbulnya persoalan sosial.

Perubahan pemanfaatan ruang dapat mengacu pada 2 hal yang berbeda, yaitu pemanfaatan ruang sebelumnya, atau rencana tata ruang. Perubahan yang mengacu pada pemanfaatan sebelumnya adalah suatu pemanfaatan baru atas lahan yang berbeda dengan pemanfaatan lahan sebelumnya, sedangkan perubahan yang mengacu pada rencana tata ruang adalah “pemanfaatan baru atas tanah (lahan) yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah disahkan.

Maksud dari KKL ini adalah untuk mengetahui manajemen sumber daya aparatur dalam pembuatan surat Keterangan Rencana Kota (KRK) di Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam KKL ini adalah:

1. Untuk mengetahui perencanaan aparatur dalam pembuatan surat Keterangan Rencana Kota (KRK) di Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengorganisasian aparatur dalam pembuatan surat Keterangan Rencana Kota (KRK) di Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui penstafan aparatur dalam pembuatan surat Keterangan Rencana Kota (KRK) di Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui pengendalian aparatur dalam pembuatan surat Keterangan Rencana Kota (KRK) di Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mencoba menulis dengan mengajukan judul sebagai berikut:

"Manajemen Sumber Daya Aparatur Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung (Studi Tentang Pembuatan Surat Keterangan Rencana Kota (KRK))".

1.2 Kegunaan KKL

Pelaksanaan KKL ini dilakukan dengan kegunaan, sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

   Laporan ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Manajemen Sumber Daya Aparatur Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung dalam pembuatan surat Keteranga Rencana (KRK).
2. Secara Teoritis

   Secara teoritis, laporan ini untuk mengembangkan teori-teori yang penulis gunakan yang relevan dengan permasalahan dalam usulan laporan ini dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
3. Secara Praktis

   Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan Manajemen Sumber Daya Aparatur Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung mengenai pemberian pembuatan surat Keteranga Rencana (KRK).

1.3 Metode KKL

Metode KKL yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan dalam pembuatan surat Keterangan Rencana Kota (KRK) yang nyata di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung. Laporan ini menggunakan metode deskriptif, karena laporan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang manajemen sumber daya aparatur dalam pemberian surat Keterangan Rencana Kota (KRK) di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, serta mendeskripsikan sejumlah konsep yang berkenaan dengan masalah pembuatan surat Keterangan Rencana Kota (KRK) tersebut. Berdasarkan metode tersebut, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penulisan kualitatif merupakan pendekatan yang mempelajari dari tingkah laku manusia khususnya aparatur Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dalam pembuatan surat Keterangan Rencana Kota (KRK). Pemahaman terhadap aparatur mengenai tingkah laku manusia, penulis harus dapat mamahami proses interpretasi dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang aparatur.

1.3.1 Tehnik Pengumpulan Data

1.3.1.1 Studi Pustaka

Kegiatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Menggunakan studi pustaka ini, penulis dapat memperoleh informasi tentang teknik-teknik laporan yang diharapkan dari buku-buku, makalah, dan intrnet sehingga pekerjaan penulis tidak merupakan duplikasi dengan mencantumkan semua sumber yang digunaka tersebut dan tidak asal-asalan dalam pembuatan penelitian ini.

1.3.1.2 Studi Lapangan

Peninjauan yang dilakukan langsung pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung yang menjadi objek penulisan laporan dengan

tujuan yakni, mencari bahan-bahan sebenarnya, bahan-bahan yang lebih banyak, lebih tepat, lebih *up to date,* disamping itu penulis juga melakukan suatu laporan dengan cara Observasi Penulis laporan tentang manajemen sumber daya aparatur dalam pembuatan surat Keterangan Rencana Kota (KRK) di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dalam pengumpulan data dengan penulis ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang aparatur lakukan. Sehingga saya sebagai penulis dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan.

1.3.2 Teknik Analisis Data

Analisa data dalam laporan ini menggunakan metode kualitatif, langkah-langkah penulisan metode kualitatif yaitu;

1) Tahapan persiapan/pra-lapangan,
2) Tahapan pekerjaan lapangan, dan
3) Tahapan analisis data.

Hal ini sejalan dengan laporan mengumpulkan data yang lengkap atau yang dibutuhkan dan kemudian dapat dianalisa oleh penulis yang menekankan pada Manajemen Sumber Daya Aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dalam surat Keterangan Rencana Kota (KRK).

1.4 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan KKL

Lokasi yang diambil sebagai tempat KKL di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, Alamat: Jl. Cianjur No. 34 Bandung. Telepon: (022) 7217451. E-mail: distarcip@bandung.go.id

1.4.1 Gambaran Umum Tempat KKL

1.4.1.1 Sejarah Dinas Tata Runag dan Cipta Karya Kota Bandung

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung berawal dari pemecahan satu seksi yang berada dalam organisasi Dinas Pekerjaan Umum (PU). Pada kondisi awal yaitu tahun 1964-1965, dalam organisasi

Dinas PU terdapat beberapa seksi yaitu seksi perencanaan gambar, seksi jalan dan jembatan, serta seksi alat berat

Untuk meningkatkan pelayanan, seksi perencanaan memisahkan diri dari Dinas PU dan membentuk Badan baru dengan nama Dinas Perencanaan Pembangunan Kota (DPPK). Istilah pembangunan kota di sini pada fisik saja, karena itu maka pada tahun 1970-an DPPK berganti nama menjadi Biro Planologi Kota.

Pada tahap berikutnya, struktur organisasi PEMDA Kota Bandung mengalami perubahan yang berupa pengelompokan-pengelompokan organisasi. Salah satu organisasi tersebut adalah EKBANGPAL (Ekonomi, Pembangunan dan Peralatan) Biro Planologi berada di bawah organisasi ini. Namun hal ini tidak berlangsung lama, pada tahun 1974 EKBANGPAL berubah menjadi Dinas Tata Kota dengan Surat Keputusan Walikota Bandung tahun 1974 dan Perda No. 12 tahun 1974. Selanjutnya pada tahun 2007 berubah menjadi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dengan surat Keputusan Walikota Bandung dan dengan perda N0. 13 tahun 2007.

1.4.2 Visi dan Misi Dinas Tata Runag dan Cipta Karya Kota Bandung

1.4.2.1 Visi Dinas Tata Runag dan Cipta Karya Kota Bandung

Visi Dinas Tata Runag dan Cipta Karya Kota Bandung 2009-2013 adalah “Memantapkan Ruang Kota Yang Bermartabat”.

Visi tersebut mengandung makna bahwa: **pertama,** ruang kota harus dapat berkontribusi terhadap terwujudnya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, sehat, indah dan hijau. **kedua,** ruang kota harus dapat berkontribusi terhadap peningkatan sarana hunian yang layak serta didukung dengan peningkatan kegiatan ekonomi kota dan **ketiga,** tata ruang kota harus dapat ditaati oleh seluruh komponen kota.

1.4.2.2 Misi Dinas Tata Runag dan Cipta Karya Kota Bandung

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Misi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang didukung dengan fasilitas kerja yang memadai.
b. Misi meningkatkan kualitas penataan ruang kota yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
c. Misi meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan pemukiman yang didukung dengan keberadaan prasarana dan sarana yang memadai.

Tabel 1.1
Jadwal KKL

Dalam menyusun laporan KKL ini penulis melaksanakan selama 8 bulan mulai dari observasi lokasi KKL sampai seminar KKL seperti pada tabel berikut :

Waktu / Kegiatan	Tahun 2012							
	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	okt	Nov	Des
Pengajuan Judul KKL	■							
Penyusunan Usulan KKL		■						
Pengajuan surat ke tempat KKL		■						
Pelaksanaan KKL			■					
Penyusunan Laporan KKL				■	■	■		
Pengumpulan Laporan KKL							■	
Seminar Laporan KKL								■